

Perpindahan Ibukota Provinsi Bali Dari Singaraja Ke Denpasar Tahun 1958-1960

Displacement the Capital Province of Bali from Singaraja to Denpasar in 1958-1960

Ni Komang Ayik Swandewi, Dewa Made Alit

Prodi Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP PGRI Bali
Jl. Seroja Tonja-Denpasar Utara, Bali (80239)

*Pos-el: ayikswandewi@gmail.com, dewadaton@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dari perpindahan Ibukota Provinsi Bali dari Singaraja ke Denpasar tahun 1958-1960; proses perpindahan Ibukota Provinsi Bali dari Singaraja ke Denpasar tahun 1958-1960. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yaitu: Heuristik, Kritik Sejarah, Interpretasi, dan Historiografi. Heuristik adalah pengumpulan data-data dan jejak-jejak sejarah meliputi, sumber benda, sumber tertulis, dan sumber lisan. Kritik Sejarah yaitu sumber-sumber yang berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan kritik untuk menyatakan kebenaran fakta-fakta tersebut dengan melakukan kritik intern dan kritik ekstern, kemudian dilakukan Interpretasi yaitu menyusun dan menggabungkan fakta-fakta sejarah satu sama lain sehingga membentuk cerita sejarah, dan terakhir adalah Historiografi penulisan cerita sejarah. Adapun Hasil penelitian: latar belakang perpindahan Ibukota Provinsi Bali dari Singaraja ke Denpasar tahun 1958-1960 karena faktor politik, faktor geografis, dan faktor ekonomi. Dalam proses perpindahan Ibukota Provinsi Bali dari Singaraja ke Denpasar pada tahun 1958-1960, melalui tahap perencanaan terlebih dahulu, lalu tahap pelaksanaan dengan memilih tempat ibukota baru, persiapan infrastruktur penunjang ibukota baru, dan persiapan pindah ke ibukota baru. Terakhir tahap perpindahan ibukota provinsi. Dampak perpindahan Ibukota Provinsi Bali dari Singaraja ke Denpasar tahun 1958-1960, dampak yang dirasakan Kota Singaraja : ekonomi, sosial. Dampak yang dirasakan Kota Denpasar : pembangunan kota, ekonomi, pariwisata, dan sosial.

Kata-Kata Kunci : Perpindahan Ibukota, Bali, Singaraja-Denpasar

Abstract. This study aims to determine the background of the transfer of the Capital of the Province of Bali from Singaraja to Denpasar in 1958-1960; the process of moving the Capital of the Province of Bali from Singaraja to Denpasar in 1958-1960. This study uses historical research methods, namely: Heuristics, Historical Criticism, Interpretation, and Historiography. Heuristics is the collection of data and historical traces including objects, written sources, and oral sources. Historical Criticism is the sources that have been collected and then carried out criticism to state the truth of the facts by conducting internal criticism and external criticism, then carried out Interpretation that is compiling and combining historical facts with each other to form historical stories, and finally Historiography history writing. The results of the study: the background of the movement of the Capital of the Province of Bali from Singaraja to Denpasar in 1958-1960 due to political factors, geographical factors, and economic factors. In the process of moving the Capital of the Province of Bali from Singaraja to Denpasar in 1958-1960, going through the planning stage first, then the implementation phase by choosing a new capital location, preparing supporting

infrastructure for the new capital, and preparing to move to the new capital. The last stage is the transfer of the provincial capital. The impact of moving the Capital of the Province of Bali from Singaraja to Denpasar in 1958-1960, the impact felt by the City of Singaraja: economic, social. Impact felt by Denpasar City: city development, economy, tourism, and social.

Key Words: Capital Displacement, Bali, Singaraja-Denpasar

PENDAHULUAN

Perpindahan ibu kota suatu pemerintahan sering terjadi dalam sejarah Indonesia. Pada masa Indonesia Kuno, ketika pengaruh Hindu sangat dominan telah terjadi perpindahan pusat pemerintahan dari Jawa tengah ke Jawa Timur. Pada masa Bali Tengah yakni masa masuknya pengaruh Majapahit ke Bali juga terjadi perpindahan pusat pemerintahan yakni dari Samprangan ke Gelgel, Klungkung dan kemudian ke Semarapura, Klungkung. (lihat Ardika, dkk. 2013.). Pada masa revolusi fisik, pusat pemerintahan Republik Indonesia juga pernah pindah dari Jogjakarta ke Bukit Tinggi. Bahkan akhir-akhir ini muncul wacana pemindahan pusat pemerintahan Republik Indonesia dari Jakarta ke luar pulau Jawa. Perpindahan pusat pemerintahan dalam lintasan sejarah Indonesia disebabkan oleh berbagai pertimbangan seperti faktor keamanan, ekonomi maupun dalam kaitannya dengan pengembangan kota di kemudian hari, sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus bergerak maju.

Masyarakat Bali banyak yang belum mengetahui bahwa pusat pemerintahan atau ibu kota Bali pada awalnya adalah Singaraja, yang dalam perjalanannya kemudian pindah ke Denpasar. Peristiwa sejarah ini belum banyak dikaji oleh para sejarawan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Bali termasuk kedalam Provinsi Sunda Kecil

dengan wilayah meliputi, Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Flores, Pulau Alor, Pulau Sumba, Pulau Timor (Provinsi Nusa Tenggara) dengan ibukota berada di Singaraja, sedangkan untuk wilayah Daerah Bali pusat pemerintahannya ada di Denpasar. Singaraja dipilih sebagai ibukota Provinsi Sunda Kecil, dan Denpasar sebagai ibukota Daerah Bali. Sistem pemerintahannya menyesuaikan diri dengan pemerintah pusat (Singaraja), dengan kepala pemerintahan tertinggi dipimpin oleh Kepala Daerah dan terdapat pula satu lembaga legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat yang berkedudukan di Denpasar (Agung,1986).

Denpasar selain berperan sebagai ibukota Daerah Bali, Denpasar juga menjadi ibukota untuk Daerah Badung (berdasarkan UU No. 69 Tahun 1958), dengan sistem pemerintahan yang masih mengakui peranan Raja sebagai regent, hanya saja pelaksanaan tugas harian dipegang oleh Dewan Pemerintah Daerah. Sistem pemerintahan seperti ini berlangsung sampai tahun 1958 yakni Provinsi Sunda Kecil terpecah menjadi tiga Provinsi, yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bali sebagai sebuah propinsi, pusat pemerintahannya tidak lagi di Singaraja tetapi langsung berada di Denpasar. Bali kemudian terbagi menjadi delapan kabupaten yakni, Badung, Tabanan, Klungkung, Gianyar, Karangasem, Jembrana, Buleleng, dan Bangli. Khusus

untuk Kabupaten Badung ibukotanya juga di Denpasar. Peranan ganda Kota Denpasar sudah dimulai sejak tahun 1950, namun sampai tahun 1958 Denpasar belum mengalami pemekaran. Baru setelah ibukota Provinsi Bali disahkan di Denpasar dengan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 23 Juni 1960, No. 52/2/36-B6, Kota Denpasar mulai berkembang (Agung,1986).

Dengan dikeluarkannya SK pada tahun 1960 ini menunjukkan bahwa Kota Denpasar sah menjadi ibukota Provinsi Bali menggantikan Kota Singaraja. Dengan demikian, terjadi perpindahan ibukota Provinsi Bali dari Singaraja ke Denpasar pada tahun 1958, dan baru sah berpindah tahun 1960 ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan dibalik terjadinya perpindahan tersebut. Bagi sebagian kalangan, latar belakang pemindahan pusat pemerintahan dari Singaraja ke Denpasar masih menjadi misteri. Sekda Buleleng, Dewa Ketut Puspaka misalnya mengatakan bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang tepat dan jelas terkait pemindahan ibu kota Propinsi bali dari Singaraja ke Denpasar, bahkan sejumlah orang yang terkait dengan pemindahan itu tidak mengetahui secara pasti.

Melihat kenyataan seperti itu, maka perlu diungkap secara ilmiah latar belakang pindahannya, proses serta dampaknya sehingga dapat menjawab berbagai pertanyaan yang ada di benak generasi sekarang dan mendatang tentang perpindahan ibu kota Bali dari Singaraja ke Denpasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, sehingga akan mengikuti prosedur kerja sejarah yang meliputi heuristic, kritik, interpretasi dan historiografi. Mengingat

untuk mendapatkan sumber data yang berupa arsip sangat sulit, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini lebih banyak yang berupa sumber sekunder, baik yang tertulis, lisan maupun benda. Ada beberapa sumber data yang digunakan diantaranya “Arsip Statis Sekretariat Negara: Produk Hukum 1949-1960 (Penciptaan). Juga arsip yang berjudul “Medhurst W.H 1837 Short Account Of The Island Of Bali”, tahun 1950 berbahasa Belanda termuat dalam Buku Sejarah Soendha Kecil Museum dan Sejarahnya. Buku “Soenda Kecil Museum dan Sejarahnya” karya Dr. I Made Pageh, M.Hum. Buku “Sejarah Kota Denpasar 1945-1979” karya A.A Gde Putra Agung.

Sumber benda diantaranya sebuah bangunan peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh hingga saat ini dan sekarang digunakan sebagai kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Semua data yang sudah terkumpul kemudian diseleksi (kritik) untuk mendapatkan data yang bias digunakan dalam penulisan sejarah pindahannya ibu kota Bali dari singaraja ke Denpasar. Kritik itu meliputi kritik ektern untuk menentukan asli tidaknya sebuah sumber, diperlukan tidaknya sebuah sumber. Kritik intern untuk mendapatkan kepastian bahwa si pembuat sumber memang memberikan keterangan sesuai dengan peristiwanya tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Data yang telah terkumpul kemudian diinterpretasikan untuk menemukan keterkaitan data satu dengan data yang lainnya dalam kontek tema perpindahan ibu kota Bali dari Singaraja ke Denpasar. Berdasarkan keterkaitan data satu dengan data yang lainnya maka kemudian disusun sebuah cerita sejarah dengan mengikuti prinsip serialisasi, kronologis maupun kausalitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Perpindahan Ibukota Provinsi Bali Dari Singaraja Ke Denpasar

Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi perpindahan ibu kota propinsi Bali dari Singaraja ke Denpasar, diantaranya faktor politik, faktor geografis dan faktor ekonomi.

Faktor Politik

Situasi dan kondisi Negara Indonesia awal kemerdekaan masih belum stabil, banyaknya pergolakan politik yang mewarnai kehidupan Bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga kurun waktu hingga 1950an. Timbulnya pergolakan politik di Indonesia, tentu diakibatkan banyaknya muncul gagasan-gagasan dari para tokoh politik maupun pemerintahan yang ingin menerapkan sistem pemerintahan baru ataupun ingin menggantikan sistem pemerintahan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Pergolakan politik di Bali berawal dari tahun 1946 ketika wilayah Bali masuk ke dalam Provinsi Sunda Kecil dengan beribukota di Singaraja dengan Denpasar berstatus sebagai pemerintahan wilayah daerah Bali. Pada tanggal 18-24 Desember 1946 diadakan Konferensi Denpasar bertempat di Bali Hotel Denpasar yang melahirkan Negara Indonesia Timur (NIT) yang pembentukannya bertentangan dengan naskah Persetujuan Linggarjati, yang menyebabkan melemahnya kedudukan MBU DPRI Sunda Kecil yang tetap memperjuangkan terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pihak NIT tetap berusaha untuk menghancurkan para pemuda yang dituduhnya perusuh dan perampok (ekstremis).

Setelah pengakuan kedaulatan, di Bali muncul partai-partai politik dan organisasi pemuda seperti, PNI, Masyumi, KPNI (Kesatuan Pemuda Nasional Indonesia), Ikatan Rakyat Murba Indonesia (IRMI), Gabungan Buruh Indonesia (GBI), Persatuan Wanita Indonesia dan Golongan Organisasi-organisasi ini pengurus daerahnya berkedudukan di Kota Denpasar, dari kalangan organisasi dan partai politik yang ada di Bali ini muncul tuntutan antara lain, (1) Demokrasi sering di bidang pemerintah, (2) Lelas didatangkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Bali, (3) Diadakan reorganisasi di kalangan kepolisian. Tani. Selain itu partai-partai yang ada di Jawa berusaha menyebarluaskan keanggotaannya di Bali (Pendit,2008). Berdasarkan suara-suara partai dan organisasi politik tersebut, pada tanggal 8 Juni 1950, Paruman Agung mengadakan sidang secara mendadak untuk membicarakan rencana perubahan ketatanegaraan di Bali. Dari hasil pertemuan itu dikeluarkan Peraturan Paruman Agung No. 1/Darurat/1950 yang menetapkan pembentukan Badan Pelaksana Pemerintahan Daerah Bali. Dengan adanya peraturan tersebut, dibentuklah Badan Pelaksana Pemerintahan Daerah Bali dengan susunan, (1) I Gusti Putu Merta (urusan politik), (2) I Gusti Gde Subamia (urusan sosial), (3) I Wayan Daging (urusan ekonomi), (4) I Wayan Badra (urusan umum) (Agung dkk. 1986).

Setelah beberapa hari Badan Pelaksana Pemerintahan Daerah Bali dibentuk, muncul pergolakan politik dengan pemerintahan NIT. Pemerintah NIT mengeluarkan undang-undang tanggal 15 Juni 1950, Nomor: 44/1950, untuk mengadakan perubahan ketatanegaraan di Indonesia Timur sesuai dengan perubahan keadaan zaman. Bersamaan dengan hal tersebut, situasi keamanan di Bali sangat

kacau dengan adanya pembunuhan terhadap bekas mata-mata NICA, penggedoran, pencurian, perampokan dan penculikan. Latarbelakang munculnya kekacauan ini bertujuan supaya Dewan Raja-raja dihapuskan dan Undang-undang No. 44/1950 segera dilaksanakan. Maka dengan kedatangan Menteri Dalam Negeri NIT ke Bali, dibentuklah Panitia Penyelenggara Undang-undang No. 44/1950, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pemerintah Bali tanggal 7 Agustus 1950, Nomor: 718/1/61, serta berkat adanya kerja keras panitia akhirnya pada tanggal 25 September 1950 berhasil dilantik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali dengan bertempat di Pendopo Bali Hotel Denpasar, dengan jumlah anggota DPR Daerah Bali pada waktu itu sebanyak 41 orang yang terdiri atas wakil-wakil dari PNI, Masyumi, KPNI, IRMI, GBI, Persatuan Wanita Indonesia, Golongan Tani dan orang-orang yang tidak terikat oleh partai/organisasi politik (Reksodihardjo, tt). Sebagai ketua DPR Daerah Bali dipilih I Gusti Putu Merta dengan wakil Ida Bagus Oka, sedangkan sebagai sekretaris adalah I Gusti Putu Gde Kuntri. Setelah pelantikan DPRD Bali diadakan pemilihan Kepala Daerah Bali dan sebagai calon terpilih Anak Agung Bagus Suteja dan Tjokorda Anom Putra. Presiden kemudian menyetujui Anak Agung Bagus Suteja sebagai Kepala Daerah Bali (Agung dkk. 1986). Untuk selanjutnya diadakan pemilihan Anggota-anggota Dewan Pemerintahan Daerah Bali dengan hasil I Gusti Made Mudra untuk urusan politik, I Gusti Gde Subamia untuk urusan sosial, I Wayan Daging untuk urusan ekonomi, dan I Gusti Bagus Sugriwa untuk urusan umum. Dari adanya pergeseran kekuasaan di Bali yang dilatarbelakangi oleh pergolakan politik, ini membuat struktur pemerintahan di Bali juga mengalami perubahan, berdasarkan Undang-undang No. 44/1950 diadakan pula perubahan struktur

pemerintahan di masing-masing Swapraja di Bali. pada bulan Mei 1951 di semua Swapraja di Bali telah terbentuk DPR Daerah Bagian (Swapraja), dan dibentuk pula Dewan Pemerintah Daerah (DPD). Dengan terbentuknya badan-badan baru ini, lembaga-lembaga pemerintahan yang ada sebelumnya seperti, Paruman Agung, Paruman Negara dan Dewan Raja-raja dibubarkan. Usaha untuk melaksanakan demokrat sering dalam bidang pemerintahan, sesuai dengan cita-cita masyarakat telah berhasil dilaksanakan (Agung dkk (1986).

Setelah pemilihan umum pertama di Indonesia tahun 1955, timbul ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Dalam situasi yang demikian ini lahir Undang-undang No. 1 tahun 1957 yaitu Undang-undang tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang berlaku untuk seluruh wilayah RI. Dengan dikeluarkan undang-undang ini menjadi awal terjadinya pergeseran pusat kekuasaan di Sunda Kecil hingga Bali yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur pemerintahan di Bali dan melatarbelakangi terjadi perpindahan Ibukota Provinsi Bali dari Singaraja ke Denpasar tahun 1958-1960. Berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1957, Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Sarimin Reksodihardjo mengusulkan kepada Pemerintah Pusat RI supaya Provinsi Nusa Tenggara dibagi menjadi dua daerah Swatantra Tingkat I, yaitu Nusa Tenggara Barat yang meliputi Pulau Bali, Pulau Lombok, dan Pulau Sumbawa dengan ibukota di Singaraja, dan kemudian daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang meliputi Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timor dengan ibukota di Kupang (Anonymous, 1956). Akan tetapi dengan disahkannya Undang-undang Nomor 64 tahun 1958 tanggal 14 Agustus 1958, akhirnya Nusa Tenggara dibagi menjadi tiga

daerah Swatantra Tingkat I, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pulau Bali dibagi menjadi delapan daerah Swatantra Tingkat II, yaitu Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Klungkung, Karangasem, dan Buleleng.

Dengan demikian secara resmi Provinsi Daerah Tingkat I Bali (Provinsi Bali) lahir pada tanggal 14 Agustus 1958 dengan ibukota di Singaraja. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 23 Juni 1960, No. 52/2/36-B6, yang berdasarkan resolusi DPRD Tingkat I Bali memutuskan Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Daerah Tingkat I, maka resmiah ibukota Provinsi Daerah Tingkat I (Provinsi Bali) dipindahkan dari Singaraja ke Denpasar (Agung, 1986).

Faktor Geografis

Suatu daerah dapat menduduki posisi sebagai ibukota tentunya harus memiliki letak geografis yang strategis yang mendukung segala kegiatan administrasi pemerintahan. Ditinjau dari letak geografis, Kota Singaraja merupakan kabupaten yang terluas di Pulau Bali, dengan mempunyai luas 1.365,88 Km² atau 136.588 Ha (24, 25 % dari luas Pulau Bali), terletak di antara 114 0 25' 55" BT – 1150 27' 28" BT dan 80 03' 40" LS – 80 23' 00" LS. Kota Singaraja berada di belahan utara Pulau Bali yang dibatasi oleh Kabupaten Jembrana di bagian Barat, Tabanan, Badung dan Bangli dibagian Selatan, sedangkan di sebelah Timurnya dibatasi oleh Kabupaten Karangasem dan di sebelah utaranya adalah Laut Jawa. Sebanyak 31,56 % berada pada ketinggian antara 100 – 499 meter di atas muka laut, daerah yang mempunyai ketinggian di atas 500 meter di atas muka laut sekitar 26,36 % sisanya merupakan lahan dataran (0 – 25 meter). Tingkat kemiringan beraneka ragam yaitu : tanah datar 8,98%, tanah landai

51,41%, selebihnya adalah tanah terjal yaitu sekitar 23,9%. Keadaan topografi yang demikian menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Buleleng sebagian besar merupakan daerah perbukitan, namun ada juga daerah pegunungan yang membelah / membagi dua bagian (Bali Utara dan Bali Selatan), yaitu yang tertinggi adalah gunung Lesong dan yang terendah adalah gunung Prapat Agung, yang sesuai dengan namanya, "Den Bukit" yang berarti "Dajan Bukit-Utara Bukit".

Letak geografis Kota Denpasar yaitu terletak di daratan rendah Bali Selatan, yang jaraknya rata-rata 7 sampai 10 km dari pantai. Posisi geografis Kota Denpasar terletak di 08°35'31" - 08°44'49" LS dan 115°10'23" sampai 115°16'27" BT, dengan luas wilayah 127,98 km² atau 127,98 Ha. Kota Denpasar secara topografi ketinggian berkisar antara 0 -75 meter di atas permukaan laut. Morfologi kemiringan lahan antara 0 – 5 % dan di daerah tepi mencapai kemiringan sebesar 15 %. Kota Denpasar termasuk daerah beriklim tropis yang dipengaruhi angin musim sehingga memiliki musim kemarau dengan angin timur (Juni – Desember) dan musim hujan dengan angin barat (September – Maret) dan diselingi pancaroba. Suhu rata – rata 25.4° C – 28.5° C dengan suhu maksimum pada bulan Agustus.

Dengan demikian, ditinjau dari letak geografis, Kota Singaraja merupakan wilayah perbukitan di Bali Utara dengan jarak tempuh yang jauh bagi kabupaten-kabupaten lain di Bali bila ingin menjalin komunikasi, dan ditambah pula oleh kondisi tanah di Singaraja yang kering dan tandus yang menyulitkan untuk pengembangan sektor pertanian sebagai penunjang perekonomian. Sedangkan untuk Kota Denpasar merupakan daerah daratan rendah dengan letak strategis yang mudah dijangkau oleh kabupaten lain di Bali. Dengan memiliki jumlah penduduk lebih

banyak ketimbang Singaraja, serta kondisi tanah yang lebih baik untuk pengembangan sektor pertanian dan pengembangan lahan untuk sektor industri dan lain sebagainya sebagai penunjang sektor pengembangan kota. Dengan demikian Kota Singaraja memiliki kurang strategis sebagai pusat pemerintahan karena dibatasi oleh bukit yang menyebabkan sulitnya akses menuju Kota Singaraja. Selain itu letak Singaraja yang jauh dan keadaan jalan yang sulit dilewati serta sering terjadi kemacetan akibat adanya kecelakaan ataupun tanah longsor dari atas bukit hingga menutupi badan jalan.

Dengan keterbatasan akses untuk menuju Singaraja, tentu akan membuat pelayanan publik tidak berjalan dengan maksimal antara pemerintah pusat yang ada di Singaraja dengan pemerintah daerah lain yang ada di Bali. Terhambatnya pelayanan publik akan menimbulkan ketidakefektifan kinerja sistem pemerintahan untuk memberika pelayanan bagi seluruh masyarakat di Bali, dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat yang tinggal diluar Singaraja yang memiliki kepentingan administrasi dengan pemerintah pusat harus mengalami kesulitan mengurus hal tersebut akibat dari pelayanan publik yang tidak bisa berjalan dengan maksimal karena keterbatasan jarak dan akses jalan menuju Singaraja. Letak Singaraja yang jauh, akses jalan yang sulit dilewati, keterbatasan kendaraan yang lewat, sulit menjalin komunikasi antara pusat dan daerah, dan pelayanan publik yang tidak dapat berjalan dengan maksimal, semua kendala-kendala yang dimiliki Singaraja sebagai ibukota Provinsi Bali pada tahun 1958 ini, menyebabkan pengembangan kota Singaraja tidak mengalami kemajuan terlihat dari berbagai bidang seperti perekonomian yang mengandalkan pelabuhan Buleleng, Sangsit dan Temukus tidak memberikan perkembangan perekonomian yang

signifikan, ini dikarenakan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Singaraja hanya melakukan kegiatan perdagangan dan bongkar muat kapal untuk pelayaran Bali dengan daerah luar pulau dengan jalur akses hanya melalui laut saja, sedangkan pelabuhan ini sulit diakses melalui jalur darat yang tentunya harus melewati jalan Denpasar-Singaraja dengan kondisi jalan yang sulit lewati. Selain bidang perekonomian, kondisi tanah yang kering dan tandus juga tidak memberikan sumbangan untuk sektor pertanian sebagai penunjang perekonomian, hal yang sama juga terlihat pada sektor pembangunan kota di Singaraja yang relatif tidak banyak mengalami perubahan dan terlihat banyak bangunan-bangunan bekas kolonial yang masih digunakan tahun 1950 an sebagai kantor pemerintahan.

Singaraja sebagai ibukota Provinsi Bali tahun 1958 memiliki banyak kelemahan sebagai sebuah pusat pemerintahan, dengan demikian perlu dilakukan pembaharuan dengan memilih kota lain sebagai ibukota provinsi, dan pada tanggal 23 Juni 1960, No. 52/2/36-B6, yang berdasarkan resolusi DPRD Tingkat I Bali memutuskan Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Daerah Tingkat I, maka resmiah ibukota Provinsi Daerah Tingkat I (Provinsi Bali) dipindahkan dari Singaraja ke Denpasar. Pemilihan Kota Denpasar sebagai ibukota provinsi menggantikan Singaraja karena dari segi letak Denpasar berada di wilayah Bali Selatan yang merupakan wilayah daratan rendah, dan memiliki letak yang strategis untuk di akses oleh kabupaten-kabupaten lain di Bali dengan jalanan yang lurus dan lebar tanpa perlu harus melewati bukit ataupun jalanan yang curam dan berbahaya seperti di Singaraja. Letak yang strategis ini memudahkan kabupaten-kabupaten lain melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat yang ada di Denpasar sehingga pengambilan kebijakan dapat dilaksanakan

dengan lebih cepat. Selain itu, dengan kemudahan akses untuk menjangkau pemerintah pusat memberikan kelebihan bagi masyarakat untuk mengurus kepentingan administrasi dengan pemerintahan pusat sehingga pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan maksimal. Selain itu Pada zaman kolonial, Denpasar sudah mengalami kemajuan dalam hal fasilitas kota yang terus mengalami pembenahan sarana dan prasarana penunjang kota, seperti jalan raya, pelabuhan, gedung-gedung perkantoran dan kawasan-kawasan pusat bisnis, industri, perekonomian dan lain sebagainya. Ketika resmi menjadi ibukota Provinsi Bali, wajah kota Denpasar yang sejak jaman kolonial sudah mengalami kemajuan dan perkembangan, kini lebih dikembangkan lagi menjadi semakin komplek sebagai pusat pemerintahan di Bali dengan pesatnya pertumbuhan industri dan aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat yang terus mengalami kemajuan (Agung dkk. 1986).

Dengan pertimbangan pemilihan Kota Denpasar sebagai ibukota yang baru menggantikan Singaraja yang berdasarkan letak geografis Kota Denpasar memiliki peluang lebih layak dijadikan ibukota karena Kota Denpasar memiliki letak yang strategis yaitu di Bali Selatan yang mudah diakses oleh kabupaten-kabupaten lain yang ada di Bali dengan memiliki kontur tanah yang landai tidak berbukit-bukit, serta memiliki akses laut yang mudah untuk pengembangan sektor perdagangan dan kepariwisataan dengan mengandalkan Pelabuhan Laut Benoa dan Pelabuhan Udara Tuban.

Faktor Ekonomi

Selain faktor politik dan geografis, perpindahan ibukota provinsi Bali dari Singaraja ke Denpasar juga dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Perlu diketahui bahwa

Singaraja dan Denpasar adalah kota-kota yang memiliki pelabuhan di Bali dan tentu perkembangan kota Singaraja dan Denpasar jauh berbeda dengan kabupaten lain yang ada di Bali karena kedua kota ini telah mengalami perkembangan dan kemajuan semenjak zaman kolonial Belanda. Maka dari itu, perlu ditinjau terlebih dahulu potensi ekonomi yang dimiliki Bali Utara dan Bali Selatan sehingga menghasilkan perpindahan ibukota dari Bali utara ke Bali Selatan.

Potensi yang dimiliki oleh Bali Utara yaitu Kota Singaraja adalah adanya Pelabuhan Alam di Singaraja, seperti Pelabuhan Buleleng, Sangsit dan Temukus, yang merupakan penggerak perekonomian masyarakat Singaraja sejak jaman kolonial Belanda hingga tahun 1950 an. Keberadaan pelabuhan ini didukung oleh kondisi pantai di Singaraja yang memiliki ombak dengan arus tenang sehingga memudahkan kapal-kapal nelayan dari berbagai pula di Indonesia untuk melakukan perdagangan ke Singaraja (Pageh, 2017). Sebagai penggerak perekonomian di Singaraja, pelabuhan-pelabuhan ini membuat pesisir pantai kota Singaraja berubah menjadi perkampungan nelayan dan saudagar dari berbagai daerah di Indonesia yang datang untuk berdagang ataupun membeli komoditi di Singaraja.

Dengan adanya pusat perdagangan maritim terutama di Pelabuhan Buleleng, membawa perubahan pada perkembangan Kota Singaraja yang menjadi Kota Pelabuhan dengan perkembangan perekonomian yang mengandalkan perdagangan hasil bumi yang dimiliki Singaraja seperti, Gula Merah, Kapas, Cengkeh, kopi, tembakau dan lain sebagainya sebagai komoditi yang dijual belikan di Pelabuhan Buleleng kepada para pedagang dan saudagar (Pageh, 2017). Komoditi-komoditi tersebut merupakan

hasil pertanian masyarakat Singaraja, meskipun kondisi alam yang berbukit-bukit dengan tanah yang tandus dan gersang, sehingga hanya mampu menanam tanaman yang tidak terlalu membutuhkan air. Selain itu, dengan kondisi geografis Singaraja yang memiliki sedikit daerah daratan rendah membuat hasil pertanian lebih banyak dihasilkan dari daerah-daerah perbukitan di Singaraja. Dengan demikian, masyarakat Singaraja sangat bergantung kepada Pelabuhan Buleleng sebagai pusat perdagangan untuk menjual hasil pertanian, sehingga segala aktivitas perekonomian ramai terjadi di Pelabuhan Buleleng.

Perkembangan Pelabuhan Buleleng yang menjadi pusat perdagangan di Bali membawa perkembangan bagi Kota Singaraja itu sendiri, ini terlihat dari banyaknya para kapal-kapal saudagar yang berlabuh di Pelabuhan Singaraja yang tentunya memberikan sumbangan ekonomi bagi Kota Singaraja dari pajak-pajak pelabuhan, dan aktivitas bongkar muat barang yang dilakukan di Pelabuhan Buleleng. Sumbangan pendapatan yang masuk dari Pelabuhan Buleleng tentu memberikan pertumbuhan dan perkembangan kota yang semakin kompleks dengan banyaknya rumah, toko, dan perkampungan para pendatang dan para pedagang dari luar Bali yang tinggal menetap di Singaraja untuk memudahkan mereka untuk melakukan aktivitas berniaga di Pelabuhan Buleleng. Semua hal tersebut, membuat Kota Singaraja banyak memiliki gedung serta rumah yang bergaya arsitektur Belanda, yang pada tahun 1958 digunakan sebagai kantor untuk segala urusan birokrasi pemerintahan. Sehingga kehidupan masyarakat Singaraja dari segi ekonomi tentu lebih baik ketimbang daerah lain di Bali dengan didukung keberadaan pelabuhan-pelabuhan sebagai pusat perdagangan dan sebagai penggerak perekonomian masyarakat.

Namun potensi yang dimiliki Kota Singaraja sebagai pusat perdagangan dan sebagai pusat pemerintahan tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan pengembangan kota lebih lanjut, sebab karena letak yang jauh dengan dibatasi bukit, dan kesulitan akses jalan menuju Singaraja membuat penduduk Singaraja lebih sedikit dari daerah lain di Bali karena sulitnya masyarakat luar menjangkau Kota Singaraja, ini membuat pembangunan di Kota Singaraja tidak mengalami perkembangan yang berawal dari zaman kolonial sampai menduduki posisi sebagai

ibukota kota masih tetap sama. Berbeda halnya dengan potensi yang dimiliki Kota Denpasar yang berada di Bali Selatan. Kota Denpasar adalah kawasan kota yang sudah dikembangkan pula oleh kolonial Belanda, ini terlihat dari kawasan kota yang tercermin dari banyaknya fasilitas kota yang telah dibangun dan dikembangkan untuk mempersiapkan Denpasar sebagai kota yang besar. Kota Denpasar mulai dibenahi oleh pemerintah kolonial dengan melakukan pembangunan jalan maupun gedung-gedung perkantoran. Agung (1986) menerangkan bahwa pemerintah kolonial menerapkan kota baru bagi Denpasar, yang menyangkut pembenahan, pelebaran, dan pembangunan baru sarana maupun prasarana kota Denpasar, seperti Pasar Badung, "Pecinaa" atau toko-toko orang Cina, membangun kawasan industri, kawasan hiburan dan rekreasi, pemukiman baru, sekolah-sekolah, dan kawasan perkantoran pelengkap administrasi pemerintahan seperti bangunan-bangunan pengurus pajak, bangunan-bangunan pengurus pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Selain itu, mulai muncul perkembangan perindustrian seperti penggilingan padi, pabrik minyak kelapa, dan pemanfaatan tempat-tempat hiburan oleh masyarakat Kota Denpasar. Lebih-lebih setelah tahun 1933, pemerintah kolonial membenahi Pelabuhan Laut Benoa dan membangun Pelabuhan Udara Tuban yang berkembang menjadi pelabuhan yang ramai dan muncul berbagai tempat penginapan, tempat rekreasi dan tujuan wisata.

Dari jaman kolonial Belanda, Kota Denpasar sudah dibenahi sarana dan prasarananya untuk menerapkan tatanan kota yang baru untuk mempersiapkan Kota Denpasar menjadi kota yang besar. Pada saat itu, potensi Kota Denpasar sebagai kota yang besar yang penuh dengan pusat-pusat kehidupan, sangat terlihat dengan adanya Pelabuhan Laut Tuban, Pelabuhan Udara

Tuban yang telah dibenahi oleh kolonial Belanda sehingga menjadi pelabuhan yang ramai untuk tujuan rekreasi dan wisata di Bali. Selain itu, juga terdapat pusat-pusat perekonomian yang telah tumbuh dan berkembang di Denpasar, seperti Pasar Badung sebagai pusat perbelanjaan dan perdagangan, banyaknya "Pecinaa" atau toko-toko orang Cina, munculnya kawasan industri, kawasan hiburan dan rekreasi, pemukiman baru, sekolah-sekolah, dan kawasan perkantoran di daerah Denpasar yang membuat kota ini menjadi kota yang ramai, banyak penduduk dan menjadi pusat Kota di Bali pada era tersebut. Letak yang strategis ini, membuat mobilitas penduduk kota terjadi dengan sangat pesat di Denpasar. Banyaknya pusat-pusat perekonomian yang telah tumbuh di Denpasar, tentu membuat masyarakat berbondong-bondong migrasi dari daerahnya ke Denpasar untuk mencari pekerjaan, sekolah, dan aktivitas-aktivitas perekonomian lainnya di kota besar. Terjadinya mobilitas di Kota Denpasar, disebabkan Kota Denpasar memiliki pusat-pusat perekonomian yang telah tumbuh dan berkembang, letak yang strategis dan mudah diakses oleh daerah lain di Bali, berada di daratan rendah tidak di daerah perbukitan seperti Kota Singaraja, membawa perkembangan yang sangat pesat di Kota Denpasar sehingga menjadi kota yang ramai. Segala pusat-pusat perekonomian dan perkembangan kota yang telah dimiliki Kota Denpasar sejak jaman Kolonial hingga tahun 1950 an, tentu potensi ini masih bisa dikembangkan lagi sehingga bisa berkembang jauh lebih baik dan jauh lebih maju sehingga menjadi pusat dari segala pusat yang ada di Bali. Dalam hal ekonomi, Kota Denpasar mampu dikembangkan lagi dengan adanya Pelabuhan Tuban dan Pelabuhan Udara Tuban sebagai sektor pendukung pariwisata di Bali dengan berwawasan budaya (Bali Sharing) yang

nanti mampu membuat kawasan Bali Selatan tumbuh menjadi tempat-tempat wisata yang mendatangkan keuntungan bagi perekonomian Kota Denpasar (Agung, 1986:).

Proses Perpindahan Ibukota Provinsi Bali Dari Singaraja ke Denpasar

Kota dianggap sebagai suatu obyek studi dimana di dalamnya terdapat masyarakat manusia yang sangat kompleks, telah mengalami proses interrelasi antar manusia dan antar manusia dengan lingkungannya. Hasil dari hubungan itu mengakibatkan terciptanya pola keteraturan dari penggunaan lahan (Burgess, 1925). Dalam suatu kota terjadinya perubahan adalah hal yang wajar, tetapi bila perubahan itu memberikan dampak yang besar akan berdampak pula bagi kehidupan masyarakat kota itu sendiri. Hal tersebut pernah dirasakan oleh Singaraja yang dahulu menjadi Ibukota Provinsi Bali pada tahun 1958 dengan segala kehidupan kota yang penuh dengan kegiatan administrasi pemerintahan dan segala kemajuan yang telah dimiliki Kota Singaraja sebagai pusat pemerintahan di Bali. Singaraja menduduki posisi sebagai ibukota Provinsi karena bercermin dari sejarah-sejarah sebelumnya yang pernah menjadi Ibukota Keresidenan Bali dan Lombok serta pernah menjadi Ibukota Provinsi Sunda Kecil.

Melihat sejarah panjang Kota Singaraja ini tentunya tidak mustahil mendapatkan kedudukan menjadi Ibukota Provinsi Bali tahun 1958. Walau demikian, Singaraja tidak berlangsung lama menjadi ibukota provinsi, sebab pada tanggal 23 Juni 1960 dikeluarkan SK (Surat Keputusan) Menteri Dalam Negeri yang secara resmi terjadilah perpindahan ibukota Provinsi Bali dari Singaraja ke Denpasar. Tanggal 14 Agustus 1958 Provinsi Bali resmi terbentuk dan secara langsung Singaraja menjadi Ibukota

Provinsi Bali, namun pada tanggal 23 Juni 1960 resmi kedudukan ibukota Provinsi Bali berpindah dari Singaraja ke Denpasar, yang berarti Singaraja menduduki jabatan sebagai Ibukota Provinsi Bali hanya 1 tahun 9 bulan 22 hari tepatnya Singaraja menjadi Ibukota Provinsi Bali sebelum akhirnya dipindahkan ke Denpasar.

Proses perpindahan Ibukota Provinsi Bali dari Singaraja ke Denpasar pada tahun 1958-1960 ini tentunya tidak bisa secara langsung berpindah tempat, memindahkan sebuah ibukota dari satu tempat ke tempat lainnya akan memerlukan waktu yang tidak singkat dan ada tahapannya. “ Perpindahan ini tidak bisa langsung, harus bertahap sebab perpindahan ini akan diikuti oleh Birokrasinya yaitu kantor-kantor pemerintah. Tahap ini ada tiga yaitu Perencanaan terlebih dahulu, lalu Pelaksanaan tentunya dan terakhir Perpindahan itu sendiri ke Denpasar “ (Pageh, wawancara pada tanggal 23 Maret 2019)

Tahap Perencanaan

Perpindahan ibukota provinsi, tahap perencanaan yang disusun oleh pemerintah Provinsi Bali dengan didukung oleh resolusi DPRD Tingkat I Bali, memberikan gambaran bahwa proses perpindahan ibukota memerlukan waktu yang tidak singkat melainkan memerlukan waktu yang cukup lama dan bertahap. Melalui waktu yang panjang dan bertahap inilah membuat pemerintah harus mampu menyusun langkah-langkah perencanaan yang tepat dan mengambil keputusan yang maksimal untuk mensukseskan perpindahan ibukota Provinsi Bali. Tahapan perencanaan sudah ditargetkan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan disetujui oleh I Gusti Putu Merta selaku Ketua DPRD Tingkat I Bali jauh sebelum ibukota resmi dipindahkan, yaitu dimulai pada tahun 1950 an (Agung, 1986) dengan perencanaan sebagai berikut :

Tahap I (Tahun 1950-1957)

Tahap perencanaan ini dilaksanakan pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1957 yaitu tahap dimana pemerintah provinsi Bali terfokus menyusun rancangan perencanaan untuk perpindahan ibukota yang meliputi rentang waktu yang diperlukan untuk memindahkan ibukota Provinsi dari Singaraja ke Denpasar. Rentang waktu yang diperlukan itu dimulai dari tahap perencanaan tahun 1950 sampai resmi berpindah tahun 1960 dan masih berlanjut sampai tahun 1963 saat memindahkan pusat birokrasi dari Singaraja ke Denpasar secara bertahap (Agung, 1986).

Tahap II (Tahun 1957-1959)

Pada tahap kedua ini yang terjadi pada tahun 1957 sampai dengan tahun 1959 ini merupakan tahap pelaksanaan dalam memindahkan ibukota Provinsi Bali dari Singaraja ke Denpasar. Tahap pelaksanaan ini meliputi, tahap pemilihan tempat, tahap persiapan infastruktur kota, dan tahap persiapan pindah ke ibukota baru. Dalam kurun waktu 2 tahun ini, segala tahap pelaksanaan perpindahan ibukota Provinsi Bali dari Singaraja ke Denpasar mampu terselesaikan, baik dari pemilihan tempat yang harus menemukan titik temu kota yang layak dan mampu menjadi ibukota Provinsi Bali, mempersiapkan infastruktur kota di ibukota yang baru untuk menunjang peranan kota tersebut sebagai ibukota yang baru dan memudahkan sistem birokrasi pemerintahan berjalan dengan maksimal.

Apabila kedua tahap tersebut sudah terlaksana dengan baik, maka tahap selanjutnya adalah tahap persiapan pindah ke ibukota yang baru, dengan mengamati lebih lanjut segala tahapan yang telah disusun dalam perencanaan dan diimplementasikan dalam pelaksanaan untuk mengetahui seberapa persen persiapan

perpindahan ibukota dari Singaraja ke Denpasar telah rampung dilaksanakan, terutama dalam hal pembangunan infastruktur kota di ibukota yang baru, untuk kelancaran sistem birokrasi pemerintahan Provinsi Bali yang tentunya memerlukan tempat birokrasi yaitu gedung dan kantor untuk menjalankan pelayanan publik bagi masyarakat di Bali. Dengan semikian, segala perencanaan dan pelaksanaan perlu dikaji dan ditinjau lebih lanjut untuk mengetahui kesiapan kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali yang baru.

Tahap III (Tahun 1959-1960)

Permulaan diawali dengan tahap perencanaan, lalu berlanjut ke tahap pelaksanaan yang terdiri dari tahap pemilihan tempat, tahap persiapan infastruktur penunjang kota dan yang terakhir yaitu tahap persiapan pindah ke ibukota yang baru yang direncanakan akan dilakukan pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1960. Dalam tahap ini, perlu dilakukan peninjauan yang lebih merata terhadap segala sesuatu yang menyangkut kesiapan kota Denpasar menerima kedudukan sebagai ibukota Provinsi Bali.

Kesiapan Kota Denpasar menerima kedudukan sebagai ibukota Provinsi Bali terlihat dari lengkapnya infastruktur kota yang telah dimiliki maupun sudah dibangun oleh pemerintah Provinsi Bali untuk menunjang Denpasar sebagai ibukota yang baru dengan mengkaji secara menyeluruh disetiap bagian kota, untuk memastikan kesiapan Kota Denpasar sebagai ibukota yang baru yang sudah lengkap memiliki infastruktur kota yang sesuai dengan harapan pemerintah Provinsi Bali. Pada tahap ini, kesiapan Denpasar yang paling penting untuk memastikan seberapa persen persiapan ibukota baru telah rampung dibangun, dan memastikan kapan waktu

yang tepat untuk memindahkan ibukota Provinsi Bali dari Singaraja ke Denpasar.

Tahap Pelaksanaan

Proses perpindahan ibukota Provinsi Bali dari Singaraja ke Denpasar tentu memerlukan tahapan pelaksanaan yang matang demi mempersiapkan Kota Denpasar sebagai ibukota yang baru, dengan berpegangan pada rancangan perencanaan yang telah disusun sebelum tahap pelaksanaan ini. Tahapan ini dimulai pada tahun 1957 hingga tahun 1960 saat SK Menteri Dalam Negeri dikeluarkan dan menyatakan bahwa ibukota Provinsi Bali dipindahkan dari Singaraja ke Denpasar, namun dengan dikeluarkannya SK tersebut, bukan berarti proses perpindahan tersebut langsung terjadi dan selesai pada tahun sama, melainkan pada tahun 1960 adalah tahun yang digunakan Pemerintah Provinsi Bali melakukan persiapan pindah ke ibukota yang baru dengan melakukan peninjauan secara merata terhadap kesiapan infrastruktur kota yang telah dibangun di ibukota yang baru terlebih dahulu sebelum benar-benar dipindahkan ke Denpasar. Tahun 1957-1960 adalah tahun yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali yang juga didukung oleh resolusi DPRD Tingkat I Bali dengan diketuai oleh I Gusti Puta Merta, untuk merealisasikan perencanaan yang telah dicanangkan tersebut dengan didukung oleh aparat pemerintahan Provinsi Bali termasuk juga DPD setiap kabupaten yang ada di Bali, demi tercapai proses perpindahan ibukota yang sudah diharapkan terlaksana dengan sebaik mungkin (Agung, 1986).

Pada tahap pelaksanaan ini, pemerintah mencanangkan beberapa tahapan untuk dilaksanakan, yaitu antara lain :

Pemilihan Tempat Ibukota Baru

Pemerintah Provinsi tentu memiliki kriteria untuk memilih kota ataupun daerah yang ada di Bali yang memiliki kelebihan dan mampu mengatasi segala permasalahan yang dihadapi oleh sebuah ibu kota, dan mampu mengantisipasi perkembangan kota lebih lanjut untuk pusat-pusat perekonomian dan menciptakan kota yang lebih besar yang penuh dengan segala kemajuan dalam setiap bidang kehidupan. Adapun pertimbangan yang diusulkan oleh DPRD dan DPD dari perwakilan kabupaten-kabupaten yang ada di Bali kepada pemerintah Provinsi Bali dalam menentukan kota yang akan dipilih menjadi ibukota yang baru adalah sebagai berikut : 1) Memiliki letak yang strategis, 2) Memiliki kemudahan dalam hal akses dan komunikasi dengan kabupaten lain, 3) memiliki potensi untuk dilakukan pengembangan kota, 4) memiliki sarana dan prasarana kota yang cukup memadai, dan 5) memiliki perekonomian yang telah berkembang (Putra Agung.dkk 1986).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah Provinsi mulai mengadakan tahap pelaksanaan dengan melakukan studi dan pengamatan terhadap kota-kota yang ada di Bali. Tahun 1957 di Bali ada 8 kabupaten, dari kedelapan kabupaten tersebut, pemerintah memfokuskan studi dan pengamatan terhadap Kota Denpasar, karena di Bali hanya ada dua kota yang telah mengalami perkembangan dan kemajuan dalam berbagai bidang yang telah ditinggalkan oleh kolonial Belanda, yaitu Kota Singaraja dan Kota Denpasar. Dengan demikian Kota Denpasar telah memiliki potensi yang sudah ada semenjak jaman kolonial Belanda dengan segala kemajuan di berbagai bidang yang telah tersentuh dan mampu dikembangkan kembali dengan menggali potensi yang sudah ada tersebut, sehingga mampu menjadi kota yang lebih besar sebagai pusat dari segala aktivitas perekonomian, bisnis, dan lain sebagainya.

Maka Kota Denpasar dipilih menjadi salah satu kota yang dilakukan studi dan pengamatan oleh para aparat pemerintahan. Studi dan pengamatan yang dilakukan untuk pemilihan alokasi tempat untuk ibukota yang baru dilakukan dengan meninjau berbagai aspek, bukan hanya melihat potensi yang sudah dimiliki Kota Denpasar, namun juga mempelajari dan mengamati letak geografis, kemudahan akses, potensi yang telah dimiliki, perkembangan perekonomian, dan meninjau sarana dan prasarana yang telah dimiliki sebagai suatu syarat layak atau tidaknya Kota Denpasar dikembangkan kembali untuk mencapai pengembangan kota yang lebih maju sebagai ibukota yang baru.

Berdasarkan kajian tersebut, ketua DPRD Tingkat I Bali I Gusti Putu Merta bersama DPD dan segenap pemerintahan Provinsi Bali menyetujui Kota Denpasar sebagai kota yang akan dilakukan tahapan studi dan pengamatan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah dicanangkan sebelumnya. Tahap awal yang dilakukan pemerintah adalah mempelajari dan melakukan pengamatan terhadap Kota Denpasar dengan melihat letaknya terlebih dahulu untuk mengetahui strategis atau tidak kawasan Bali Selatan dijadikan ibukota yang baru. Ditinjau dari letaknya, Kota Denpasar berada di daratan rendah di Bali Selatan dengan letaknya berdekatan dengan kabupaten-kabupaten lain seperti, Gianyar, Klungkung, Tabanan dan kabupaten lainnya, sehingga akses menuju Denpasar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, dengan akses jalan yang lurus dan tidak berbukit.

Dengan kemudahan akses menuju Denpasar yang lebih mudah dicapai, tentu Kota Denpasar memiliki letak yang strategis dan memberikan kemudahan bagi kabupaten-kabupaten lain untuk menjangkau Denpasar bila menjadi ibukota provinsi.

Letak yang strategis berada di Bali Selatan dengan kemudahan akses menuju Kota Denpasar tentu memberikan pengaruh pada pengembangan kota yang seiring waktu akan dapat mengalami kemajuan dengan mudahnya masyarakat daerah lain menjangkau Kota Denpasar untuk melakukan kegiatan ekonomi yang akan menumbuhkan pusat-pusat bisnis dan lain sebagainya.

Selain itu, Kota Denpasar sudah memiliki pusat-pusat perekonomian yang cukup berkembang jauh sebelum masa kemerdekaan, yang berarti Denpasar sudah mampu mengembangkan sektor ekonomi jauh lebih baik ketimbang kota lain di Bali. Kemudahan akses dan letak yang strategis, dengan didukung oleh potensi yang masih bisa dikembangkan lagi untuk menjadikan Denpasar kota yang maju dalam bidang perekonomian dan bidang lainnya, dan dari segi kondisi kota, Denpasar sudah memiliki tata kota yang maju sejak jaman kolonial Belanda dengan banyaknya gedung dan perkantoran yang telah dibangun di Kota Denpasar yang nanti dapat dijadikan sarana dan prasarana pendukung kota bagi ibukota provinsi yang baru dengan dapat diperbaharui lagi dengan pembangunan infrastruktur kota yang lebih bagus lagi saat ibukota resmi dipindahkan ke Denpasar.

Dengan demikian, pemilihan kota atau daerah untuk ibukota provinsi yang baru yang telah dilakukan dengan melihat potensi dan kondisi yang telah ada di kota tersebut, tentu layak dan strategis dijadikan ibukota Provinsi Bali menggantikan Singaraja. Tahapan studi dan pengamatan yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1957 terhadap Kota Denpasar memberikan hasil yang sesuai yakni terpilihnya Kota Denpasar sebagai kota yang menggantikan Singaraja sebagai ibukota.

Maka tahapan pelaksanaan pemerintah dengan melakukan pemilihan kota atau daerah yang akan dijadikan ibukota yang

baru dengan melakukan studi dan pengamatan dengan salah satu kota yang ada di Bali yang paling memiliki kelebihan dan mampu mengatasi permasalahan ibukota di Singaraja, dengan berpedoman pada pertimbangan yang telah disusun oleh aparat pemerintahan Provinsi Bali untuk melakukan pemilihan tempat untuk ibukota yang baru, dan terpilih lah Kota Denpasar sebagai calon ibukota yang baru untuk Provinsi Bali.

Persiapan Infrastruktur Penunjang Ibukota Baru

Pemerintah Provinsi Bali yang didukung oleh DPRD dan DPD di masing-masing kabupaten di Bali berhasil menentukan dan memilih Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali yang baru. Untuk itu perlu dilakukan persiapan-persiapan untuk mendukung Kota Denpasar sebagai ibukota, yaitu melakukan pembangunan infrastruktur penunjang kota, namun perlu diketahui bahwa Kota Denpasar sebelum dipilih menjadi calon ibukota provinsi telah memiliki tatanan kota yang cukup memadai dengan banyaknya gedung serta bangunan perkantoran yang dibangun oleh Kolonial Belanda saat dijadikan pusat pemerintahan kolonial Belanda. Dalam kaitan ini, Agung (1986) mengatakan bahwa pemerintah kolonial menerapkan kota baru bagi Denpasar, yang menyangkut pembenahan, pelebaran, dan pembangunan baru sarana maupun prasarana kota Denpasar, seperti Pasar Badung, "Pecinaa" atau toko-toko orang Cina, membangun kawasan industri, kawasan hiburan dan rekreasi, pemukiman baru, sekolah-sekolah, dan kawasan perkantoran pelengkap administrasi pemerintahan seperti bangunan-bangunan pengurus pajak, bangunan-bangunan pengurus pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Selain itu, mulai muncul perkembangan perindustrian seperti

penggilingan padi, pabrik minyak kelapa, dan pemanfaatan tempat-tempat hiburan oleh masyarakat Kota Denpasar. Lebih-lebih setelah tahun 1933, pemerintah kolonial membenahi Pelabuhan Laut Benoa dan membangun Pelabuhan Udara Tuban yang berkembang menjadi pelabuhan yang ramai dan muncul berbagai tempat penginapan, tempat rekreasi dan tujuan wisata. Maka pemerintah Provinsi Bali hanya perlu membangun infrastruktur kota yang masih kurang dan belum dimiliki kota Denpasar, serta mengalih fungsikan bangunan pemerintah Belanda yang masih bisa digunakan menjadi gedung-gedung pemerintahan untuk pemerintatahan Provinsi Bali. Dalam menjalankan tahap pelaksanaan ini, pemerintah Provinsi Bali mulai melakukan pembenahan tatanan kota di Denpasar, yang dimulai dengan membangun infrastruktur penunjang kota terlebih dahulu seperti gedung pemerintahan, pusat pemerintahan, dan lain sebagainya.

Tahun 1957 sampai tahun 1960 adalah tahun bagi pemerintah Provinsi untuk melakukan pemekaran terhadap wajah Kota Denpasar menjadi pusat pemeritahan yang mampu memberikan pelayanan bagi seluruh masyarakat di Bali secara maksimal. Pemekaran terhadap Kota Denpasar mulai dilakukan pada tahun 1958 dengan pemerintah Provinsi Bali mengambil kebijakan dalam hal pembangunan infrastruktur penunjang kota Denpasar sebagai ibukota yang baru dengan membangun pusat perkantoran di kawasan Niti Mandala Renon. Kawasan ini direncanakan merupakan kota satelit yang baru dan pada kawasan ini pula telah dibangun pusat perkantoran untuk tingkatan yang sederajat dengan pemerintahan tingkat provinsi seperti kantor-kantor wilayah, Kantor Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kesehatan, Kantor Perdagangan, Kantor Keuangan, Kantor Bendahara Negara, dan banyak lagi yang baru dalam tahapan

pembangunan perencanaan. Pemerintah mengambil kebijakan dengan membuat sebuah pusat perkantoran yang terpusat di satu kawasan yaitu di Renon untuk memudahkan menjalankan sistem pemerintahan yang terpusat di satu titik tanpa perlu mengalami kesulitan jarak antara kantor pemerintahan yang lokasinya berjauhan, dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengurus segala kepentingan administrasinya di satu kawasan yang terpusat.

Selain pusat perkantoran, infrastruktur yang dibangun dan dibenahi oleh pemerintah di Kota Denpasar adalah jalan raya. Jalan raya di Kota Denpasar pada masa kolonial sangat diperhatikan dengan mengadakan pelebaran dan pembangunan kembali jalan-jalan kota, bahkan sudah mengadakan pengaspalan. Pemerintah kolonial mengadakan pelebaran serta pengaspalan jalan menuju Sanur, Kuta, Lansekap Gianyar dan Lansekap Tabanan serta Lansekap Buleleng (LU van Stenis, Memorie Van Overgave van het Gewest Bali en Lombok. 1919:52-53). Selain itu, pemerintah juga melakukan kebijakan pembangun sarana dan prasarana kota dalam sektor perekonomian untuk menunjang Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali. Diketahui bahwa pada masa kolonial Belanda sudah dibangun Pelabuhan Udara Tuban dan Pelabuhan laut Benoa untuk menunjang sektor ekonomi dalam bidang kepariwisataan yang telah berkembang sebelum kemerdekaan di Bali.

Persiapan Pindah Ke Ibukota Baru

Pemerintah provinsi Bali telah mengambil kebijakan dengan meminta aparat pemerintahan untuk melakukan imigrasi terlebih dahulu pada tahun 1959 ke ibukota yang baru, meskipun secara resmi ibukota belum berpindah, tetapi kebijakan ini memberikan waktu yang cukup banyak bagi para aparat pemerintahan dan pegawai untuk

memersiapkan diri pindah bekerja ke ibukota yang baru.

Dikeluarkannya kebijakan oleh pemerintah pada tahun 1959 yang memperbolehkan para aparat pemerintahan untuk melakukan perpindahan ke Kota Denpasar sebelum resmi berpindah, bukan berarti mereka bisa langsung pindah, melainkan mereka bisa mulai mempersiapkan diri dan mulai ancang-ancang untuk pindah dari waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah tersebut. Dengan adanya kebijakan seperti ini, diharapkan oleh pemerintah, aparat pemerintahan dan parapekerja tidak merasa kewalahan dalam mempersiapkan diri untuk pindah karena waktu yang diberikan terlalu sedikit, apalagi jarak antara Kota Singaraja ke Kota Denpasar cukup jauh.

Tahap Perpindahan Ibukota Provinsi

Proses perpindahan Ibukota Provinsi Bali dari Singaraja ke Denpasar pada tahun 1958-1960 ini tentunya tidak bisa secara langsung dan cepat, memerlukan waktu yang tidak singkat. Memindahkan bukan hanya sekedar memindahkan nama saja, tetapi berpindahnya sebuah ibukota provinsi tentunya akan diikuti oleh birokrasi pemerintahannya juga.

Perpindahan ibukota ini dilakukan secara bertahap tentu memerlukan waktu yang tidak singkat, maka setelah tahun 1960 proses perpindahan ini masih terjadi hingga tahun 1963 yaitu proses memindah birokrasi pemerintahan yang tentu harus memindahkan data-data penting, arsip, dana dan lain sebagainya yang terus dilakukan sampai semuanya selesai, meskipun masih ada pegawai serta kantor yang bertugas di Singaraja mengatas namakan pemerintahan Denpasar, tetapi pemindahan ini akan tertap terjadi dan semua birokrasi pemerintahan, kantor-kantor, pegawai, aparat pemerintahan meninggalkan Kota Singaraja dan berpindah

ke ibukota yang baru yaitu di Kota Denpasar (Agung, 1986). Dengan demikian, proses perpindahan ibukota Provinsi Bali yang resmi terjadi pada tahun 1960 ini memiliki proses yang panjang dengan banyak tahapan yang harus dilewati oleh pemerintah Provinsi Bali hingga berhasil sukses memindahkan ibukota dengan segala pusat-pusat kehidupan dari Bali Utara ke Bali Selatan. Proses yang panjang tersebut dimulai dari tahun 1950 hingga sampai tahun 1963, dari tahap perencanaan, lalu tahap pelaksanaan, hingga sampai pada perpindahan ibukota tersebut. Terjadinya perpindahan ini terlepas dari tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang maksimal dengan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal bagi seluruh masyarakat di Bali tanpa adanya kendala-kendala penghambat dibalik tujuan tersebut.

Dampak Yang Ditimbulkan dari Perpindahan Ibukota Provinsi Bali

Dampak yang ditimbulkan dari perpindahan ibukota Provinsi Bali dari Singaraja ke Denpasar tahun 1958-1960 yaitu terjadinya perubahan terhadap ekonomi dan sosial masyarakat Kota Singaraja yang terlihat dengan perekonomian Kota Singaraja yang perlahan-lahan mengalami penurunan Pelabuhan Buleleng, Sangsit, dan Temukus mulai mengalami penurunan dan akhirnya pelabuhan buleleng berhenti total dan menjadi pelabuhan eks Buleleng.

Dalam bidang sosial masyarakat Singaraja harus mampu dan mulai menyesuaikan diri dengan keadaan kota mereka yang mulai sepi aktivitas perkantoran, ekonomi, dan lain sebagainya. Masyarakat mulai menyesuaikan diri dengan beralih profesi untuk menyambung hidup dengan tidak mengandalkan pelabuhan lagi sebagai urat nadi perekonomian mereka.

Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari perpindahan ibukota ini

terlihat pada perkembangan pembangunan yang mulai tumbuh pesat di Kota Denpasar, dalam bidang ekonomi mulai berdiri pusat-pusat ekonomi, bisnis, perdagangan di Denpasar, mulai berkembang pesat kepariwisataan di Kota Denpasar dengan banyaknya berdiri jasa kepariwisataan yang menyediakan Hotel, Penginapan, Restaurant, dan lain sebagainya yang didukung oleh Pelabuhan Udara Tuban dan Pelabuhan Laut Benoa sebagai akses turis asing ke Bali, dan yang terakhir pada bidang sosial yang mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat di Denpasar.

SIMPULAN DAN SARAN

Latar Belakang perpindahan ibukota Provinsi Bali dari Singaraja ke Denpasar tahun 1958-1960 didukung oleh tiga faktor, yaitu faktor politik, faktor geografis dan faktor ekonomi. Proses perpindahan ibukota Provinsi Bali dari Singaraja ke Denpasar tahun 1958-1960 melalui tahapan antara lain, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap perpindahan ibukota provinsi.

Dampak yang ditimbulkan dari perpindahan ibukota Provinsi Bali dari Singaraja ke Denpasar tahun 1958-1960 adalah dampak yang timbul di Singaraja yaitu, dampak ekonomi dan sosial, dan dampak yang timbul di Kota Denpasar yaitu pembangunan kota, ekonomi, pariwisata, dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. 1956. Tentang Pemerintahan Swapradja. Kupang: Djawatan Penerangan Daerah Timor.
- Gde Putra Agung. Anak Agung, dkk. 1986. Sejarah Kota Denpasar 1945-1979. Denpasar: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional Jakarta.

I Wayan Ardika, I Gde Parimartha dan Anak Agung Bagus Wirawan. 2013. Sejarah Bali Dari Prasejarah Hingga Modern. Denpasar: Udayana University Press.

Pageh, I Made. 2017. Soenda Kecil Museum Dan Sejarahnya. Singaraja: Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.

Umar, Rika. 1986. Mr I Gusti Ketut Pudja Riwayat Hidup Dan Pengabdianya.

Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Wirawan, Anak Agung Bagus. 2012. Pusaran Revolusi Indonesia Di Sunda Kecil 1945-1950. Denpasar: Udayana University Perss.